

LAPORAN KEUANGAN

Periode Tahunan

Tahun Anggaran 2023

**BPSPL
DENPASAR**

 bpspl.denpasar@kkp.go.id

 (0361) 4794821

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gianyar, 31 Desember 2023

Kepala BPSPL Denpasar



Petreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

JLN. BY PASS PROF. IDA BAGUS MANTRA, PERING GIANYAR, BALI
TELEPON 0361-4794822, FAXIMILE 0361-4794821

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gianyar, 31 Desember 2023

Kepala Balai,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

Laporan Keuangan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Periode Tahunan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode sampai 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.052.288.384 atau mencapai 359,09 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 850.000.000

Realisasi Belanja Negara pada periode sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 13.678.924.464 atau mencapai 97,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.073.397.000 terdiri dari Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 12.548.397.000 dan Anggaran PNBPN sebesar Rp 1.525.000.000 dan terdapat anggaran blokir Non Automatic Adjustment sebesar Rp 375.000.000. Serta sebesar 99,86 persen jika tidak termasuk blokir anggaran Automatic Adjustment.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 18.686.809.287 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1.620.243 dan Aset Tetap sebesar Rp.18.685.189.044,

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 16.942.651 dan Rp. 18.669.866.636.

3.LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.042.026.022, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 13.919.536.695 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (7.410.556.936). Jumlah Defisit Pelepasan Aset Lancar Non Lancar sebesar Rp (2.582.051) serta jumlah surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 1.767.916.363 sehingga Jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 1.765.334.312.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp.17.155.406.917 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (9.112.176.361) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 10.626.636.080 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.18.669.866.636.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2023			ANGGARAN TA. 2022
		ANGGARAN	REALISASI	% Terhadap Anggaran	
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	850.000.000	3.052.288.384	359,09	2,606,420,102
JUMLAH PENDAPATAN		850.000.000	3.052.288.384	359,09	2,606,420,102
BELANJA	B.2	14.073.397.000	13.678.924.464	97,20	13.692.938.327
Belanja Pegawai	B.3	6.168.397.000	6.161.254.472	99,88	5.720.201.572
Belanja Barang	B.4	7.532.000.000	7.148.119.992	94,90	7.058.203.155
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
Belanja Modal	B.6	373.000.000	369.550.000	99,07	914.533.600
JUMLAH BELANJA		14.073.397.000	13.678.924.464	97,20	13.692.938.327

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	955.243	1.503	953.740	63.455,76
Piutang Bukan Pajak (Netto)	955.243	1.503	953.740	63.455,76
Persediaan	665.000	413.500	251.500	60,82
JUMLAH ASET LANCAR	1.620.243	415.003	1.205.240	290,42
ASET TETAP				
Tanah	12.602.880.000	12.602.880.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	4.624.287.162	4.294.487.262	329.799.000	7,68
Gedung dan Bangunan	5.447.657.922	3.482.147.922	1.965.510.000	56,45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.116.000	302.116.000	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.291.752.040)	(3.510.959.216)	(780.792.824)	22,24
JUMLAH ASET TETAP	18.685.189.044	17.170.671.968	1.514.517.076	8,82
JUMLAH ASET	18.686.809.287	17.171.086.971	1.515.722.316	8,83
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16.942.651	15.680.054	1.262.597	8,05
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.942.651	15.680.054	1.262.597	8,05
JUMLAH KEWAJIBAN	16.942.651	15.680.054	1.262.597	8,05
EKUITAS				
Ekuitas	18.669.866.636	17,155,406,917	1.514.459.719	8,83
JUMLAH EKUITAS	18.669.866.636	17,155,406,917	1.514.459.719	8,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.686.809.287	17,171,086,971	1.515.722.316	8,83

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.042.026.022	2.596.642.325	445.383.697	17,152
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.042.026.022	2.596.642.325	445.383.697	17,152
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	3.042.026.022	2.596.642.325	445.383.697	17,152
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	6.160.300.732	5.720.201.572	440.099.160	7,694
Beban Persediaan	90.232.633	98.408.420	(8.175.787)	(8,308)
Beban Barang dan Jasa	2.602.682.166	3.176.883.011	(574.200.845)	(18,074)
Beban Pemeliharaan	445.798.808	304.787.283	141.011,525	46,266
Beban Perjalanan Dinas	3.812.009.935	3.181.488.009	630.521.926	19,818
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	198,407,547	299.483.930	(101,076,383)	(33.75)
Beban Bunga	0	0	0	0.00

Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	610.104.874	540.771.653	69.333.221	12,821
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN	13.919.536.695	13,322,023,878	597.512.817	4,485
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10.877.510.673)	(10,725,381,553)	(152.129.120)	1,418
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2.582.051)	(214.399.298)	211.817.247	(94.805)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.555.999	9.777.777	(1.221,778)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,138,050	224.177.075	(213.039.025)	(95.032)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.767.916.363	0	1.767.916.363	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.767.916.363	18.747.700	1.749.168.663	9,330.044
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	18,747,700	(18.747.700)	(100)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.765.334.312	(214,399,298)	1.979.733.610	(923,38)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.112.176.361)	(10,939,780,851)	1.827.604.490	(16,706)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.112.176.361)	(10,939,780,851)	1.827.604.490	(16,706)

IV. LAPORAN PERUBAHAN ENTITAS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN PERUBAHAN ENTITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
1		2	3	4	5
EKUITAS AWAL	E.1	17.155.406.917	17.008.668.040	146.738.877	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(9.112.176,361)	(10.939.780.851)	1.827.604.490	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		0	0	0	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan		0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi		0	0	0	-
Koreksi Lain-lain		0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.626.686.080	11.086.518.225	(459.882.145)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.514.459.719	146.737.374	1.367.722.345	-
EKUITAS AKHIR	E.5	18.669.866.636	17.155.405.414	1.514.461.222	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Denpasar

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

UPT BPSPL Denpasar secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara struktural unit kerja BPSPL Denpasar berada pada struktur eselon III A yang membawahi 1 sub bagian umum serta Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008.

BPSPL Denpasar diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAKTI ini diterapkan mulai tahun anggaran 2023 ini yang terdiri atas berbagai modul diantaranya Modul Admin, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP (General Ledger dan Pelaporan). Aplikasi SAKTI ini dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan hasil dari modul-modul yang lain yang secara langsung terintegrasi data-datanya sehingga menghasilkan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Perubahan
Penerapan
Metode
Penilaian ke
First In First
Out

(11) Perubahan Penerapan Metode Penilaian Persediaan dari Harga Perkiraan Terakhir ke metode First In First Out (FIFO)

Sehubungan dengan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan

sosial (bansos); barang rusak/usang; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan, jenis transaksi, serta jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI sama dengan metode penilaian HPT. Namun demikian, hal-hal yang membedakan metode penilaian FIFO dari HPT antara lain:

- Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat diminimalkan.
- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi Transfer Keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT.

Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI Perubahan metode penilaian persediaan dari HPT menjadi FIFO diakomodasi Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- Saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan tahun 2020 audited menjadi saldo awal persediaan tahun 2021.
- Harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2020 menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO.

Realisasi
Pendapatan Rp
3.052.288.384

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.052.288.384 atau mencapai 359,09 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 850.000.000. Pendapatan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 31 DESEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Negara Bukan Pajak	850,000,000	3,052,288,384	359.09
Jumlah	850,000,000	3,052,288,384	359.09

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan 17,11 persen dibandingkan 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan hingga 31 Desember Tahun 2023 terdapat kenaikan pendapatan negara bukan pajak berupa dari Kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta penerimaan kembali atas belanja tahun anggaran yang lalu. Nilai pendapatan negara bukan pajak sejumlah Rp 3.052.288.384 dengan rincian

1. Akun 425131 sebesar Rp 4.992.108 merupakan pendapatan atas tarif sewa rumah negara selama bulan Januari hingga Desember tahun 2023.
2. Akun 425122 sebesar Rp 8.555.999 merupakan pendapatan penjualan BMN berupa peralatan dan mesin berdasarkan risalah lelang nomor 1343/65/2023 tanggal 12 Desember 2023.
3. Akun 425629 sebesar Rp 1.478.728.914 merupakan pendapatan jasa kelautan atas pungutan perdagangan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfataanya dan atau dilarang ekspor (SIPJI).
4. Akun 425259 sebesar Rp 1.558.305.000 merupakan pendapatan perizinan lainnya atas rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfataanya dan atau dilarang ekspor (SAJI).

5. Akun 425911 sebesar Rp 1.503 sebesar merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengembalian belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas nama I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya senilai Rp 1.158
 - Pengembalian belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas nama Yuniarti Karina senilai Rp 110
 - Pengembalian belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas nama Arisandi senilai Rp 235
6. Akun 425912 sebesar Rp 1.704.860 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun anggaran 2022 terdiri atas rincian sebagai berikut :
- Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 960.000
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 26.000
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 1.500
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 43.000
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 623.960
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas biasa senilai Rp 9.000
 - Pengembalian belanja berupa perjalanan dinas paket meeting luar kota senilai Rp 41.400

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER TA.2023	REALISASI 31 DESEMBER TA.2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8,555,999	9,777,777	-12.50
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4,992,108	4,158,594	
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,558,305,000	1,373,085,000	13.49
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,478,728,914	1,217,012,244	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2,386,487	
Pendapatan Lain-Lain	1,706,363	-	
Jumlah	3,052,288,384	2,606,420,102	17.11

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.13.678.924.464*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 13.678.924.464 atau 97,19 % dari anggaran belanja sebesar Rp 14.073.397.000 termasuk anggaran Automatic Adjustment. Serta sebesar 99,86 % jika tidak termasuk blokir anggaran nonAutomatic Adjustment. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

URAIAN	Per 31 DESEMBER 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	6,168,397,000	6,161,254,472	99.88
Belanja Barang	7,532,000,000	7,148,119,992	94.90
Belanja Modal	373,000,000	369,550,000	99.08
Total Belanja Kotor	14,073,397,000	13,678,924,464	97.20
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	14,073,397,000	13,678,924,464	97.20

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023, realisasi belanja Per 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,10 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan pangkat atau golongan pegawai, mutasi pegawai yang awalnya jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional khusus serta akselerasi pelaksanaan kegiatan. Serta adanya penambahan 2 orang PPPK sebagai PELP dan arsip aris.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,161,254,472	5,720,201,572	7.71
Belanja Barang	7,148,119,992	7,058,203,155	1.27
Belanja Modal	369,550,000	914,533,600	(59.59)
Jumlah	13,678,924,464	13,692,938,327	(0.10)

Belanja Pegawai
Rp.6.161.254.472

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.161.254.472 dan Rp 5.720.201.572. Realisasi belanja Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,34 persen dibandingkan dengan dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya serta beberapa pegawai yang mengalami naik pangkat/golongan serta beberapa pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional. Serta per Agustus 2023 terdapat tambahan 2 orang PPPK sebagai fungsional PELP dan arsip aris.

Tahun anggaran 2023 terdapat pengembalian belanja pegawai berjumlah Rp 1.147 dikarenakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 1.147 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 135 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0036A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 63 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0037A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 227 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0035A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 506 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0188A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 120 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0189A

- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 96 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0190A

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2023	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,021,085,206	5,646,231,975	6.64
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	73,040,413	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium			#DIV/0!
Belanja Lembur	67,130,000	74,345,000	(9.70)
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	6,161,255,619	5,720,576,975	7.70
Pengembalian Belanja Pegawai	1,147	375,403	(99.69)
Jumlah Belanja	6,161,254,472	5,720,201,572	7.71

*Belanja Barang
Rp 7.148.119.992*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2023 dan Per 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.148.119.992 dan Rp 7.058.203.155. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,27 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022. Terdapat belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan KOMPAK yang telah diserahkan terimakan kepada Kelompok Segoro Lestari di Kabupaten Blitar dan Pokmaswas Penimbangan Lestari di Kabupaten Buleleng.

Perbandingan Belanja Barang

Per 31 Desember TA 2023 dan Per 31 Desember TA 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,205,715,187	1,216,217,967	(0.86)
Belanja Barang Non Operasional	483,030,650	282,766,780	70.82
Belanja Barang Persediaan	90,484,133	97,689,106	(7.38)
Belanja Jasa	912,673,732	1,677,092,880	(45.58)
Belanja Pemeliharaan	445,798,808	304,787,283	46.27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,758,979,807	3,159,501,198	18.97
Belanja Perjalanan Luar Negeri	53,030,128		
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	198,407,547	36,995,430	436.30
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan	-	299,483,930	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	7,148,119,992	7,074,534,574	1.04
Pengembalian Belanja	-	16,331,419	(100.00)
Jumlah Belanja	7,148,119,992	7,058,203,155	1.27

Belanja Bantuan
Sosial Rp.0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat alokasi belanja bantuan sosial pada BPSPL Denpasar.

Belanja Modal
Tanah Rp.0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembelian tanah dikantor BPSPL Denpasar pada TA. 2023 tidak mendapatkan alokasi belanja modal tanah.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 369.550.000

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 369.550.000. Nilai realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 59,59 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2022 sebesar Rp 914.533.600.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember TA 2023 dan Per 31 Desember TA 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	369,550,000	914,533,600	-59.59
Jumlah Belanja Kotor	369,550,000	914,533,600	-59.59
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	369,550,000	914,533,600	-59.59

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BPSPL Denpasar TA 2023 tidak memiliki alokasi belanja modal gedung dan bangunan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp.0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

BPSPL Denpasar TA 2023 tidak memiliki alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0*

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan pembelian belanja modal lainnya.

*DIPA Awal dan
Revisi Anggaran*

B.11 DIPA Awal dan Revisi Anggaran

Pada DIPA Awal Tahun 2023 ini BPSPL Denpasar memiliki anggaran Rp 13.490.340.000, DIPA Awal disahkan pada tanggal 30 November 2022. Serta adanya info pagu blokir anggaran sebesar Rp 1.630.000.000. Pada Bulan Januari 2023 melakukan revisi POK 1 pada tanggal 2 Januari 2023 dan POK 2 pada tanggal 31 Januari 2023 merupakan revisi yang memuat pergeseran anggaran antarjenis belanja dan pergeseran anggaran. Pada Bulan Maret 2023 melakukan revisi POK 3 pada tanggal 9 Maret 2023 mengakomodir pergeseran antar akun belanja.

Pertengahan Bulan April melakukan revisi DIPA 2 ini merupakan revisi yang memuat pergeseran anggaran antarjenis belanja & Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional, revisi Administrasi yang memuat Penyesuaian Rencana Penarikan dan realisasi belanja serta ada revisi Hal III DIPA disahkan pada tanggal 13 April 2023.

Pada Bulan Mei Tahun 2023 BPSPL melakukan revisi POK 4 pada tanggal 16 Mei 2023 dan POK 5 pada tanggal 30 Mei 2023 yang memuat Pergeseran anggaran antarjenis belanja.

Pada Bulan Juni Tahun 2023 BPSPL melakukan revisi POK 6 yang memuat Pergeseran anggaran antarjenis belanja dan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional serta revisi administrasi disahkan pada 20 Juni 2023. Serta revisi POK 7 memuat Revisi Penambahan Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan disahkan pada tanggal 23 Juni 2023.

Pada Bulan Juli Tahun 2023, BPSPL Denpasar melakukan Revisi Halaman III DIPA yang didalamnya mengakomodir revisi rencana penarikan dana dan pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 13 Juli 2023.

Pada Bulan Agustus Tahun 2023, BPSPL Denpasar melakukan revisi POK 8 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 9 Agustus 2023. Revisi DIPA 4 tanggal 30 Agustus 2023 didalamnya penambahan anggaran yang semula Rp 13.490.340.000 menjadi Rp 15.015.340.000 yang merupakan anggaran PNPB.

Pada Bulan September Tahun 2023, BPSPL Denpasar melakukan revisi POK 9 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 14 September 2023 dan revisi POK 10 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 23 September 2023.

Pada Bulan Oktober Tahun 2023, BPSPL Denpasar melakukan revisi DIPA 5 yang didalamnya mengakomodir perubahan halaman III DIPA Triwulan IV Tahun Anggaran tanggal 23 Oktober 2023 dan revisi DIPA 6 yang didalamnya mengakomodir pergeseran blokir AA (*Automatic Adjustment*) kembali ke bagian anggaran Bendahara Umum Negara dan revisi buka blokir non AA (*Automatic Adjustment*) untuk kegiatan fasilitasi verifikasi dan pendampingan penyediaan dan pemanfaatan sarana/prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil tanggal 23 Oktober 2023. Serta Revisi POK 11 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 10 Oktober 2023.

Pada Bulan November Tahun 2023, BPSPL Denpasar telah melakukan Revisi DIPA 7 yang didalamnya mengakomodir penambahan belanja pegawai tanggal 10 November 2023 serta Revisi POK 1 dan 14 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 24 dan 30 November 2023.

Pada Bulan Desember Tahun 2023, BPSPL Denpasar telah melakukan revisi POK 15 tanggal 18 Desember dan POK 16, 17 pada tanggal 21 Desember 2023 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian revisi POK 18 dan 19 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya revisi DIPA ke 8 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan dan revisi administrasi tanggal 4 Desember 2023. Lalu revisi DIPA ke 9 yang didalamnya mengakomodir pemutakhiran KPA tanggal 26 Desember 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Saldo UP RM	-	-
Saldo UP PNBP	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak
Rp. 955.243

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 955.243 dan Rp. 1.503. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Piutang Bukan Pajak	955,243	1,503
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	955,243	1,503

Adapun rincian piutang bukan pajak per 31 Desember TA. 2023 senilai Rp 955.243 yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember sebesar Rp 205.743
2. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember sebesar Rp 9.500
3. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS Bulan Desember sebesar Rp 740.000

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp. 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp (0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka
Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada BPSPL Denpasar tidak terdapat belanja yang dibayar dimuka.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp. 665.000

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 665.000 dan Rp 413.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp665.000 berupa kertas HVS Sidu A4 80 gram sebanyak 5 RIM dan tinta pronter HP 52 sebanyak 3 buah. Sisa saldo persediaan ini terdiri dari saldo awal Rp413.500 ditambah mutasi tambah sebesar Rp288.891.680 dikurangi mutasi kurang sebesar Rp288.640.180. Adapun mutasi tambah berasal dari pembelian barang konsumsi untuk operasional BPSPL Denpasar dan pembelian bantuan KOMPAK, sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya pemakaian barang konsumsi operasional dan transaksi penyerahan kepada masyarakat. Adapun penjelasan atas transaksi diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Transaksi Penyerahan kepada Masyarakat antara lain berupa:

117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA berupa :

1. Bantuan untuk Kelompok Penggerak Konservasi yang diserahkan kepada Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari yang berlokasi di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur senilai Rp95.927.547 berupa gazebo kayu, bak fiber, motot ATV, printer, proyektor, layar proyektir, pengeras suara, laptop, mesin pompa air, papan mading, tandon air, telepon lapangan, tenda dan senter. Bantuan ini telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BA.2434/BPSPL.4/PL.440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
2. Bantuan untuk Kelompok Penggerak Konservasi yang diserahkan kepada POKMASWAS Panimbangan Lestari yang berlokasi di Banjar Galiran, Desa Bakti Segara, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali senilai Rp102.480.000 berupa Cressi BCD, Masker Trinidad, Snorkel, Booties, Wetsuit, Belt, Diving Weight, Divecom, Underwater Camera. Bantuan ini telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor B.1701/BPSPL.4/PL.450/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Nilai perbandingan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Barang Konsumsi	665,000	413,500
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	665,000	413,500

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA
Rp.0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp(0)

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah
Rp.12.602.880.000

C.13 Tanah

Nilai aset Tanah pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.12.602.880.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.400 m² yang merupakan tanah lokasi kantor BPSPL Denpasar yang beralamat di Jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra KM.16,7 Desa Pering Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Sampai dengan periode laporan ini tidak ada transaksi penambahan ataupun pengurangan aset tanah. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.400 m2	Jln. By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Pering, Gianyar-Bali	12,602,880,000

Peralatan dan Mesin
Rp. 4.624.287.162

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.624.287.162 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 4.294.487.262, mutasi tambah yang berasal dari transaksi penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp332.653.400 berupa 2 unit mini bus kendaraan roda empat mobil toyota avanza yang batal dilelang sesuai dengan surat Kepala BPSPL Denpasar nomor B.975/BPSPL.4/PL.750/III/2023 perihal Permohonan Pembatalan Lelang. Sampai periode 31 Desember 2023 mutasi tambah terdiri dari transaksi

pembelian belanja modal dari dana penggunaan PNBPN dan pembelian dari dana belanja barang ekstrakomptabel yang membentuk aset ekstrakomptabel. Nilai realisasi penambahan aset dari belanja modal tersebut bersumber dari Penggunaan Dana PNBPN sebesar Rp170.250.000 berupa pengadaan laptop dan tablet PC. Adapun sampai dengan periode 31 Desember 2023 ini terdapat mutasi kurang sebesar Rp173.103.500. bilai mutasi kurang tersebut terjadinya karena adanya transaksi pengentian dari penggunaan dan usulan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat. Sampai dengan periode 31 Desember 2023, proses penyelesaian BMN dalam kondisi rusak berat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada BPSPL Denpasar terdapat BMN dalam kondisi Rusak Berat senilai Rp.173.103.500 yang berasal dari kelompok peralatan dan mesin berupa 2 unit facsimiles, 8 unit laptop, 1 unit LCD Proyektor, 2 unit camera underwater, 2 unit telepon lapangan, 1 unit finger print, 1 unit lemari kayu, 1 unit aquarium dan 1 unit televisi.
- b. Sampai saat ini BMN telah dilakukan usulan persetujuan penghapusan sesuai dengan surat kepala BPSPL Denpasar nomor B.3956/BPSPL.4/PL.750/IX/2023 tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terbit surat persetujuan penghapusan sesuai surat nomor KPB.146/DJPRL.1/PL.750/IX/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
- c. Kemudian telah dilaksanakan Lelang BMN sesuai dengan surat penetapan lelang dari KPKNL Denpasar Nomor S-5017/KNL.1401/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang BMN BPSPL Denpasar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023.
- d. BMN yang menjadi objek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang sesuai dengan BA Serah Terima Nomor 5561/BPSPL.4/PL.750/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.
- e. Kemudian telah terbit Risalah Lelang dari KPKNL Denpasar nomor 1343/65/2023 tanggal 12 Desember 2023
- f. Proses selanjutnya menunggu penerbitan SK Penghapusan sebagai dasar penghapusan BMN dari pencatatan.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	Rp4.294.487.262
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	Rp170.250.000
- Penggunaan Kembali	Rp332.653.400
Mutasi Kurang	
- Usulan Penghapusan BMN	Rp173.103.500
Saldo per 31 Desember 2023	Rp4.624.287.162
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	Rp3.610.454.541
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp1.031.832.621

Gedung dan Bangunan
Rp. 5.447.657.922

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.447.657.922 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 9 unit dengan nilai sebesar Rp 3.492.041.322. Mutasi tambah dengan jumlah barang 1 unit berupa perolehan aset dari eks aset badan penyehatan perbankan nasional senilai Rp 1.766.210.000 melalui penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 446/KN/2022 tanggal 1 Oktober 2022 telah menetapkan status penggunaan atas Aset Negara berupa aset negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 135 m2 dan 1 (satu) unit bangunan seluas 270 m2 untuk dapat digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah diserahterimakan dari Kementerian Keuangan kepada KKP pada 6 Juni 2023 dengan BAST Nomor BA-56/KN/2023. Selanjutnya KKP menyerahkan aset tersebut kepada Ditjen PKRL dalam hal ini BPSPL Denpasar untuk penggunaannya. Kemudian pada tahun 2023 aset gedung bangunan tersebut mengalami penambahan nilai sebesar Rp199.300.000 berupa perbaikan dan renovasi kantor yang berasal dari penggunaan dana PNBPN 2023. Adapun aset perolehan tersebut telah disertifikasi, namun masih atas nama pemilik aset lama PT. Bank Mashil Utama, selanjutnya proses balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian kelautan dan Perikanan menjadi tanggungjawab satker BPSPL Denpasar. Sampai dengan periode ini satker BPSPL Denpasar telah melakukan koordinasi dengan KPKNL Denpasar dan KPKNL Sidoarjo untuk proses pendaftaran sertifikasi tanah pemerintah.guna menindaklanjuti hasil koordinasi dengan KPKNL Denpasar dan KPKNL Sidoarjo, Satker BPSPL

Denpasar telah melakukan permohonan fasilitasi proses sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah pemerintah sesuai dengan surat nomor B.5596/BPSPL.4/PL.210/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Permohonan Sertifikasi Aset Tanah. Adapun sampai dengan periode ini tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Gedung dan Bangunan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,482,147,922
Mutasi Bertambah	
Perolehan Lainnya Aset Eks BPPN Kemenkeu	1,766,210,000
Penambahan Nilai Gedung Bangunan	199,300,000
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN/Hibah	-
Saldo per 31 Desember 2023	5,447,657,922
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	436,119,699
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5,011,538,223

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.302.116.000*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 302.116.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 302.116.000. Adapun sampai dengan periode ini tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	302.116.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	302.116.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	245.177.800
Nilai Buku per 31 Desember 2023	56.938.200

*Aset Tetap Lainnya
Rp.0*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00, dan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pada periode 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi kurang atau transaksi tambah konstruksi dalam pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan
Rp.(4.291.752.040)

C.19 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp (4.291.752.040) dan Rp.(3.510.959.216). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.624.287.162	(3.610.454.541)	1.013.832.621
2	Gedung dan Bangunan	5.447.657.922	(436.119.699)	5.011.538.223
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	284,691,000	(227.752.800)	56.938.200
4	Aset Tetap YTDDOP	17.425.000	(17.425.000)	0
Akumulasi Penyusutan		10.274.061.084	(4.291.752.040)	6.082.300.044

Aset Tak Berwujud Rp.0

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Pengelolaan tidak terdapat saldo ATB. BPSPL Denpasar tidak memiliki aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain Rp.0

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Pada Satker BPSPL Denpasar sampai dengan periode 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan

Uang Muka dari KPPN
Rp.0

C.22 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 16.942.651

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 16.942.651 dan Rp 15.680.054. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Pembayaran Telepon	6,699,121	Di bayarkan bulan Januari 2024
Beban Pembayaran Listrik	9,865,650	Di bayarkan bulan Januari 2024
Beban Pembayaran Air	377,880	Di bayarkan bulan Januari 2024
Total	16,942,651	

C.24 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp 0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.26 Ekuitas

Ekuitas
Rp.18.669.866.636

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 18.669.866.636 dan Rp 17.155.406.917. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp.3.042.026.022

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.042.026.022 dan Rp 2.596.642.325. Rincian Pendapatan telah dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PER 31 DESEMBER TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4,992,108	4,158,594	20.04
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,558,305,000	1,373,085,000	13.49
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,478,728,914	1,217,012,244	
Pengembalian Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	-	2,386,487	(100.00)
Jumlah	3,042,026,022	2,596,642,325	17.15

Beban Pegawai
Rp.6.160.300.732

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.160.300.732 dan Rp 5.720.201.572. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan perbandingan Beban pegawai pada 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 mengalami kenaikan 7,69 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya serta beberapa pegawai yang mengalami naik pangkat/golongan serta beberapa pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional. Serta per Agustus 2023 terdapat tambahan 2 orang PPPK sebagai fungsional PELP dan arsip aris.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,102,701,500	2,030,238,660	3.57
Beban Pembulatan Gaji PNS	40,988	42,429	(3.40)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(1,147)	(403)	184.62
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,320,520	115,511,700	(0.17)
Beban Tunj. Anak PNS	29,429,398	26,998,014	9.01
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	20,340,000	23.89
Beban Tunj. Fungsional PNS	248,230,000	176,500,000	40.64
Beban Tunj. PPh PNS	3,167,549	2,182,307	45.15
Beban Tunj. Beras PNS	105,660,780	103,705,440	1.89
Beban Uang Makan PNS	260,434,000	301,966,000	(13.75)
Beban Tunjangan Umum PNS	52,050,000	56,635,000	(8.10)
Beban Gaji Pokok PPPK	25,102,000	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	324	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,186,600	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	237,320	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,910,000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,231,140	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	5,222,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	67,130,000	74,345,000	(9.70)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(375,000)	(100.00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3,077,906,231	2,812,112,425	9.45
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	36,141,529	0	#DIV/0!
Jumlah	6,160,300,732	5,720,201,572	7.69

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp.90.232.633*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 90.232.633 dan Rp. 98.408.402. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat barang konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pada satker BPSPL Denpasar nilai beban persediaan ini berasal dari transaksi keluar persediaan karena habis pakai berupa barang konsumsi alat tulis kantor dan bahan komputer yang digunakan rutin untuk operasional kegiatan perkantoran. Adapun terjadinya kenaikan nilai beban persediaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan nilai belanja barang yang berasal dari akun belanja 521811. Hal ini terjadi karena adanya penambahan kebutuhan karena penambahan pegawai dan adanya kenaikan harga barang di pasar. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	90.232.633	98.408.420	(8,30)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.2.602.682.166*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.602.682.166 dan Rp 3.176.883.011. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa barang konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2023	Per 31 Desember Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	847,674,270	841,949,849	0.68
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,496,720	13,231,376	(20.67)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174,408,000	172,140,000	1.32
Beban Barang Operasional Lainnya	163,645,565	135,328,220	20.92
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,490,632	53,568,522	(82.28)
Beban Bahan	201,973,765	143,497,580	40.75
Beban Honor Output Kegiatan	236,200,000	123,765,200	90.85
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36,020,585	10,181,200	253.80
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi	0	4,000,000	(100.00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,836,300	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	129,328,787	110,551,273	16.99
Beban Langganan Telepon	101,038,845	83,731,314	20.67
Beban Langganan Air	5,204,610	1,962,660	165.18
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,231,539	0	#DIV/0!
Beban Sewa	571,566,800	690,373,817	(17.21)
Beban Jasa Profesi	14,550,000	18,603,000	(21.79)
Beban Jasa Lainnya	82,740,748	722,900,000	(88.55)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,275,000	51,099,000	(97.50)
Jumlah	2,602,682,166	3,176,883,011	(18.07)

Beban
Pemeliharaan
Rp.445.798.808

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 445.798.808 dan Rp 304.787.283. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PER 31 DESEMBER TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210,258,114	133,956,097	56.96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,543,194	167,477,136	38.85
Beban Pemeliharaan Jaringan	2,997,500	3,354,050	(10.63)
Jumlah	445,798,808	304,787,283	46.27

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.3.812.009.935

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.812.009.935 dan Rp 3.181.488.009. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	PER 31 DESEMBER TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,285,781,518	1,953,984,178	16.98
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,560,568	101,134,500	(3.53)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,315,000	3,660,000	99.86
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	53,030,128	36,995,430	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,368,322,721	1,085,713,901	26
Jumlah	3,812,009,935	3,181,488,009	19.82

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 198.407.547*

D.7 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 198.407.547 dan Rp. 299.483.930. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini BPSPL Denpasar hingga September Tahun 2023 telah menyerahkan bantuan kepada dua kelompok yaitu satu kelompok Masyarakat bidang konservasi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur satu kelompok masyarakat pengawas di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Adapun adanya penurunan nilai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi karena pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan berjumlah dua kelompok sedangkan pada tahun 2022 sejumlah tiga kelompok. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat hingga 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA berupa :

1. Bantuan untuk Kelompok Penggerak Konservasi yang diserahterimakan kepada Kelompok Segoro Lestari yang berlokasi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur senilai Rp 95.927.547 berupa peralatan dan mesin dalam bentuk bak fiber, motor ATV, printer, proyektor, layer proyektor, TOA Pengeras suara, alat speaker portable, laptop, pail ember, keranjang rabbit mesin pompa air, papan madding, papan nama bantuan dan tandon air profil tank. Serta berupa gedung dan bangunan dalam bentuk gazebo kayu. Bantuan ini telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BA.2434/BPSPL.4/PRL.440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
2. Bantuan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diserahterimakan kepada POKMASWAS Penimbangan Lestari yang berlokasi di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali senilai Rp102.480.000 berupa peralatan dan mesin dalam bentuk BCD, masker, fins, booties, wetsuit, belt, diving weight, dive computer, kamera underwater dan underwater scooter. Bantuan ini telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor BA.1701/BPSPL.4/PRL.450/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2023	Per 31 Desember Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	11,658,000	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	186,749,547	299,483,930	(37.64)
Jumlah	198,407,547	299,483,930	(33.75)

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 610.104.874

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 610.104.874 dan Rp 540.771.653. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember Tahun 2023	Per 31 Desember Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	475,521,510	425,275,614	11.81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,624,564	76,969,464	25.54
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	37,958,800	37,958,800	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	567,775	(100.00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	610,104,874	540,771,653	12.82

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Beban Lain-lain
Rp.0*

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
1.765.334.312*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Per 31 Desember Tahun 2023 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 1.765.334.312 dan Per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp (214.399.298). Terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 1.767.916.363 terdiri atas penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 1,704.860 dan senilai Rp 1.503 yang merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu serta Rp 1.766.210.000 yang merupakan pendapatan perolehan aset lainnya di Sidoarjo. Adapun surplus/defisit pelepasan aset non lancar berasal dari transaksi pengehetian penggunaan BMN dan usulan penghapusan BMN yang terjadi karena terdapat BMN yang masih memiliki masa manfaat (belum habis disusutkan) namun diusulkan penghapusan berupa kamera underwater dan laptop. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,582,051)	(214,399,298)	(98.80)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8,555,999	9,777,777	(12.50)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,138,050	224,177,075	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,767,916,363	0	
Pendapatan dari dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,767,916,363	18,747,700	
Beban dari dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	18,747,700	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,765,334,312	(214,399,298)	(923.39)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp. 17.155.406.917*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.17.155.406.917 dan Rp. 17.008.668.040

*Defisit LO
Rp.
(9.112.176.361)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (9.112.176.361) dan Rp. (10.939.780.851). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0*

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0*

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukannya penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0*

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

*Koreksi Lain - Lain
Rp.0*

E.3.5. Koreksi Lain - Lain

Koreksi lain - lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.10.626.636.080*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 10.626.636.080 dan Rp 11.086.518.225. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Ekuitas Akhir
Rp.18.669.866.636*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.669.866.636 dan Rp 17.155.405.414.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada akhir bulan Juni 2023 Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia. Melalui Kepres ini, Presiden juga mencabut penetapan kedarutan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana alam. Sehingga untuk beberapa kegiatan mulai untuk dilakukan langsung ke lapangan agar maksimal hasilnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, keikutsertaan Bimbingan Teknis atau Sosialisasi mulai dilakukan secara luring atau hadir ditempat namun tetap menerapkan protokol kesehatan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ✓ Tahun Anggaran 2023 BPSPL Denpasar terdapat akun pada Laporan neraca diantaranya Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 16.942.651. Terdiri atas belanja barang yang masih harus dibayar yang merupakan belanja langganan akrual telepon sebesar Rp 6.699.121, langganan Listrik sebesar Rp 9.865.650 dan langganan air sebesar Rp 377.880.
- ✓ Terdapat Jurnal penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar selama bulan Desember dan akan dibayarkan pada Tahun anggaran 2024 senilai Rp. 16.942.651 dengan rincian transaksi berasal dari :
 1. Rp 377.880 dari belanja barang yang masih dibayar berupa biaya langganan air
 2. Rp 9.865.650 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan listrik
 3. Rp 6.699.121 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan telepon
- ✓ Tahun Anggaran 2023 BPSPL Denpasar terdapat beberapa akun covid diantaranya akun 522192 sebesar Rp 6.775.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.275.000. Pada akun 521131 sebesar Rp 8.450.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.449.632. Untuk penggunaannya akun 522192 digunakan untuk tes swab antigen maupun PCR sedangkan untuk akun 521131

digunakan untuk pembelian masker, obat-obatan, vitamin, hand sanitizer dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19.

- ✓ Telah dilakukan koreksi SPM 515 yang merupakan koreksi data transaksi pengeluaran yang dilakukan terhadap bagan akun standar (BAS) tanpa mengubah data awal dan tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran. Koreksi atas penggunaan akun khusus covid-19 yaitu akun 521131 (belanja barang operasional-penanganan pandemi covid-19) dan 522192 (belanja jasa-penanganan pandemi covid-19) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2-23 mengenai hal penggunaan akun khusus covid dengan nomor SPM 222 dan SPM 250.
- ✓ Terdapat Jurnal Balik atas penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar selama bulan Desember dan akan dibayarkan pada Tahun anggaran 2023 senilai Rp. 15.680.054 dengan rincian transaksi berasal dari :
 - 4. Rp 244.800 dari belanja barang yang masih dibayar berupa biaya langganan air
 - 5. Rp 10.037.823 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan listrik
 - 6. Rp 5.397.431 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan telepon
- ✓ Pada Tahun Anggaran 2023 BPSPL Denpasar telah menerapkan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan serta telah memiliki 4 akun signifikan diantaranya :
 - 1. Akun 111611 : Kas di Bendahara Pengeluaran
Transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan uang persediaan tunai, pencatatan penarikan dan pertanggungjawaban uang persediaan tunai, rekonsiliasi internal, pencatatan transaksi uang persediaan KKP, pelaporan kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan serta pengungkapan kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya diantaranya adanya perbedaan pencatatan Uang Persediaan antara Pengelola Keuangan/Penanggungjawab Kegiatan dan BP, Adanya kesalahan pencatatan kodifikasi (KRO/RO/akun/ komponen/sub komponen/detail akun).

2. Akun 425259 : Pendapatan Perizinan Lainnya

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan tagihan/billing pada Aplikasi SIMPONI, Pelaporan PNBPN terkait Pendapatan Perizinan Lainnya dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya Adanya Kesalahan pencatatan nilai tagihan pada Aplikasi SIMPONI, Terdapat selisih nilai PNBPN antara Aplikasi SAKTI modul Bendahara dengan Modul GLP serta Adanya informasi yang kurang memadai terkait Pendapatan Perizinan Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan

3. Akun 117124 : Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Masyarakat

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah penginputan atau Pencatatan transaksi belanja barang persediaan, Pelaporan Persediaan Peralatan dan Mesin Yang Diserahkan Ke Masyarakat dalam Laporan Keuangan dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya adalah Dokumen sumber belum dicatat, terdapat kesalahan penginputan kode barang, nilai persediaan, volume, tanggal dan nomor SP2D, kode MAK dan jenis persediaan, terdapat ketidaksesuaian rincian persediaan yang diinput dengan rincian persediaan pada lampiran BAST, Terdapat barang persediaan yang dikeluarkan dari buku persediaan sebelum atau tanpa dokumen BAST dari KPB kepada penerima bantuan. Untuk tahun anggaran 2023 BPSPL Denpasar akan memberikan Persediaan Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada Masyarakat di 2 lokasi yaitu di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Buleleng.

- ✓ Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional (PN) VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pada BPSPL Denpasar pelaksanaannya

melalui 2 kegiatan yaitu kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.975.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.594.071.632 atau sebesar 87,195 % serta kegiatan Perencanaan Ruang Laut dengan anggaran sebesar Rp 1.550.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.544.847.394 atau sebesar 99,66 %.

- ✓ Pada tahun anggaran 2023 BPSPL Denpasar terdapat anggaran tema responsive gender yang didalam terdapat kegiatan Bantuan Kelompok Masyarakat sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi hingga 31 Desember 2023 ini sebesar Rp 288.634.548 atau 99,45 %.
- ✓ Barang Milik Negara yang berada pada Satker BPSPL Denpasar sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diketahui bahwa Barang Milik Negara yang berada pada Satker BPSPL Denpasar sampai dengan pengadaan tahun 2023 masih terdapat BMN yang belum ditetapkan Status Penggunaan BMN senilai Rp 179.086.300. Nilai BMN tersebut adalah realisasi belanja modal dan belanja barang ekstrakomtable yang membentuk aset ekstrakomptabel yang terjadi selama transaksi pada bulan Januari-Desember 2023 berupa 22 unit peralatan dan mesin. Adapun progres penetapan status penggunaan sampai dengan saat ini adalah Satker BPSPL Denpasar telah melakukan permohonan penetapan status penggunaan atas seluruh BMN tersebut baik melalui aplikasi SIMAN pada plugin Pengelolaan dan melalui administrasi persuratan dari Kepala BPSPL Denpasar kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai dengan surat nomor B.108/BPSPL.4/PL.710/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	1 unit (2400 m2)	12.602.880.000	0	0	1 unit (2400 m2)	12.602.880.000
Peralatan dan Mesin	628 unit	4.480.341.682	22 unit	179.086.300	650 unit	4.659.427.982
Gedung dan Bangunan	10 unit	5.457.551.322	0	0	10 unit	5.457.551.322
Jalan, Irigas dan Jaringan	2 unit	302.116.000	0	0	2 unit	302.116.000
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
Aset Tak	0	0	0	0	0	0

Berwujud						
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	641	22.842.889.004	22 unit	179.086.300	663 unit	23.021.975.304

L A M P I R A N

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 07	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : 2200	BALI
SATUAN KERJA : 477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl. Cetak 08/07/2023 5:39 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,503	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	413,500	0
0.0	131111	Tanah	12,602,880,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,294,487,262	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,482,147,922	0
0.0	134112	Irigasi	284,691,000	0
0.0	134113	Jaringan	17,425,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,964,245,081
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	339,495,135
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	189,794,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	17,425,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	15,680,054
0.0	391111	Ekuitas	0	17,155,406,917
JUMLAH			20,682,046,187	20,682,046,187

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	955,243	1,503	953,740	63,455.76
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	955,243	1,503	953,740	63,455.76
Persediaan	665,000	413,500	251,500	60.82
JUMLAH ASET LANCAR	1,620,243	415,003	1,205,240	290.42
ASET TETAP				
Tanah	12,602,880,000	12,602,880,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,624,287,162	4,294,487,262	329,799,900	7.68
Gedung dan Bangunan	5,447,657,922	3,482,147,922	1,965,510,000	56.45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	302,116,000	302,116,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,291,752,040)	(3,510,959,216)	(780,792,824)	22.24
JUMLAH ASET TETAP	18,685,189,044	17,170,671,968	1,514,517,076	8.82
JUMLAH ASET	18,686,809,287	17,171,086,971	1,515,722,316	8.83
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,942,651	15,680,054	1,262,597	8.05
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,942,651	15,680,054	1,262,597	8.05
JUMLAH KEWAJIBAN	16,942,651	15,680,054	1,262,597	8.05
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,669,866,636	17,155,406,917	1,514,459,719	8.83
JUMLAH EKUITAS	18,669,866,636	17,155,406,917	1,514,459,719	8.83
JUMLAH EKUITAS	18,669,866,636	17,155,406,917	1,514,459,719	8.83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,686,809,287	17,171,086,971	1,515,722,316	8.83

Keterangan :

FINAL

GIANYAR, 15 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



GETREDA MELSINA HEHANUSSA

197503032002122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	955,243	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	665,000	0
0.0	131111	Tanah	12,602,880,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,624,287,162	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,447,657,922	0
0.0	134112	Irigasi	284,691,000	0
0.0	134113	Jaringan	17,425,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,610,454,541
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	436,119,699
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	227,752,800
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	17,425,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,942,651
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,678,924,464
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,052,288,384	0
0.0	391111	Ekuitas	0	17,155,406,917
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,555,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,992,108
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,558,305,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	1,478,728,914
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,503
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,704,860
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,766,210,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,102,701,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,841	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,320,520	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	29,429,398	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	248,230,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,167,549	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	105,660,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	260,434,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	52,050,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,102,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	324	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,186,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	237,320	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,910,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,231,140	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:26 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	5,222,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	67,130,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,077,906,231	0
3.0	512414	Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	36,141,529	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	847,674,270	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,496,720	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174,408,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	163,645,565	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,490,632	0
3.0	521211	Beban Bahan	201,973,765	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	236,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	36,020,585	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,836,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	129,328,787	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	101,038,845	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,204,610	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,231,539	0
3.0	522141	Beban Sewa	571,566,800	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	14,550,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	82,740,748	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,275,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210,258,114	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,543,194	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,997,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,285,781,518	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	97,560,568	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,315,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,368,322,721	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	53,030,128	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	475,521,510	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,624,564	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	37,958,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	90,232,633	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	11,658,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	186,749,547	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	11,138,050	0
JUMLAH			39,961,524,456	39,961,524,456

Keterangan :
FINAL

GIANYAR, 15 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KERALA KANTOR



GETRED MELSINA HEHANUSSA

197503032002122003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 07

SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR 477419

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:23 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359	286,200,000	2,606,420,102	2,320,220,102	911
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359	286,200,000	2,606,420,102	2,320,220,102	911
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359	286,200,000	2,606,420,102	2,320,220,102	911
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	14,073,397,000	13,678,924,464	(394,472,536)	97	13,757,130,000	13,692,938,327	(64,191,673)	100
1. Belanja Pegawai	6,168,397,000	6,161,254,472	(7,142,528)	100	5,757,105,000	5,720,201,572	(36,903,428)	99
2. Belanja Barang	7,532,000,000	7,148,119,992	(383,880,008)	95	7,082,618,000	7,058,203,155	(24,414,845)	100
3. Belanja Modal	373,000,000	369,550,000	(3,450,000)	99	917,407,000	914,533,600	(2,873,400)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR 477419

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/01/24 4:23 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,073,397,000	13,678,924,464	(394,472,536)	97	13,757,130,000	13,692,938,327	(64,191,673)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

GIANYAR, 15 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR

GERTREDA MELSINA HEHANUSSA
197503032002122003



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 477419
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALI
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 15/01/24 4:29 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 15/1/24 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,930,680,000	2,102,703,000	2,102,701,500	0	2,102,701,500	100	1,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	42,000	40,988	1,147	39,841	97.59	2,159
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	119,401,000	115,322,000	115,320,520	0	115,320,520	100	1,480
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27,961,000	29,430,000	29,429,398	0	29,429,398	100	602
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	197,820,000	248,230,000	248,230,000	0	248,230,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	116,000	3,169,000	3,167,549	0	3,167,549	99.95	1,451
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	106,458,000	105,661,000	105,660,780	0	105,660,780	100	220
511129	Belanja Uang Makan PNS	432,420,000	266,302,000	261,174,000	0	261,174,000	98.07	5,128,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,430,000	52,050,000	52,050,000	0	52,050,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,899,528,000	2,948,109,000	2,942,974,735	1,147	2,942,973,588	99.83	5,135,412
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	25,102,000	25,102,000	0	25,102,000	100	0
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,000	324	0	324	32.4	676
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,187,000	1,186,600	0	1,186,600	99.97	400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	238,000	237,320	0	237,320	99.71	680
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	3,910,000	3,910,000	0	3,910,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,232,000	1,231,140	0	1,231,140	99.93	860
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	6,874,000	5,222,000	0	5,222,000	75.97	1,652,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	38,544,000	36,889,384	0	36,889,384	95.71	1,654,616
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	30,780,000	67,153,000	67,130,000	0	67,130,000	99.97	23,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	30,780,000	67,153,000	67,130,000	0	67,130,000	99.97	23,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,980,032,000	3,078,439,000	3,078,110,471	0	3,078,110,471	99.99	328,529
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	36,152,000	36,151,029	0	36,151,029	100	971
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,980,032,000	3,114,591,000	3,114,261,500	0	3,114,261,500	99.99	329,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,910,340,000	6,168,397,000	6,161,255,619	1,147	6,161,254,472	99.88	7,142,528
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	903,552,000	847,727,000	847,674,270	0	847,674,270	99.99	52,730
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,276,000	10,499,000	10,496,720	0	10,496,720	99.98	2,280

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 477419
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALI
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/01/24 4:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 15/1/24 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	180,000,000	174,408,000	174,408,000	0	174,408,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	156,002,000	164,761,000	164,686,565	0	164,686,565	99.95	74,435
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43,500,000	8,450,000	8,449,632	0	8,449,632	100	368
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,302,330,000	1,205,845,000	1,205,715,187	0	1,205,715,187	99.99	129,813
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	287,300,000	263,870,000	201,973,765	0	201,973,765	76.54	61,896,235
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	209,760,000	236,208,000	236,200,000	0	236,200,000	100	8,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	136,355,000	126,032,000	36,020,585	0	36,020,585	28.58	90,011,415
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	8,864,000	8,836,300	0	8,836,300	99.69	27,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	633,415,000	634,974,000	483,030,650	0	483,030,650	76.07	151,943,350
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	204,000,000	90,490,000	90,484,133	0	90,484,133	99.99	5,867
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	204,000,000	90,490,000	90,484,133	0	90,484,133	99.99	5,867
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	185,000,000	129,517,000	129,500,960	0	129,500,960	99.99	16,040
522112	Belanja Langganan Telepon	125,000,000	99,738,000	99,737,155	0	99,737,155	100	845
522113	Belanja Langganan Air	25,200,000	5,073,000	5,071,530	0	5,071,530	99.97	1,470
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,400,000	8,248,000	8,231,539	0	8,231,539	99.8	16,461
522141	Belanja Sewa	345,400,000	571,669,000	571,566,800	0	571,566,800	99.98	102,200
522151	Belanja Jasa Profesi	83,400,000	36,150,000	14,550,000	0	14,550,000	40.25	21,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	77,200,000	82,748,000	82,740,748	0	82,740,748	99.99	7,252
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	63,300,000	6,775,000	1,275,000	0	1,275,000	18.82	5,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	912,900,000	939,918,000	912,673,732	0	912,673,732	97.1	27,244,268
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,990,000	210,353,000	210,258,114	0	210,258,114	99.95	94,886
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181,370,000	232,775,000	232,543,194	0	232,543,194	99.9	231,806
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	9,000,000	3,000,000	2,997,500	0	2,997,500	99.92	2,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	385,360,000	446,128,000	445,798,808	0	445,798,808	99.93	329,192
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,618,675,000	2,422,668,000	2,285,781,518	0	2,285,781,518	94.35	136,886,482
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,850,000	120,303,000	97,560,568	0	97,560,568	81.1	22,742,432
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,800,000	7,415,000	7,315,000	0	7,315,000	98.65	100,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	749,670,000	1,411,228,000	1,368,322,721	0	1,368,322,721	96.96	42,905,279
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,636,995,000	3,961,614,000	3,758,979,807	0	3,758,979,807	94.89	202,634,193

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 477419
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALI
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/01/24 4:29 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 15/1/24 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	53,031,000	53,030,128	0	53,030,128	100	872
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	53,031,000	53,030,128	0	53,030,128	100	872
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	200,000,000	200,000,000	198,407,547	0	198,407,547	99.2	1,592,453
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	200,000,000	200,000,000	198,407,547	0	198,407,547	99.2	1,592,453
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,275,000,000	7,532,000,000	7,148,119,992	0	7,148,119,992	94.9	383,880,008
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305,000,000	173,000,000	170,250,000	0	170,250,000	98.41	2,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	305,000,000	173,000,000	170,250,000	0	170,250,000	98.41	2,750,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	200,000,000	199,300,000	0	199,300,000	99.65	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	200,000,000	199,300,000	0	199,300,000	99.65	700,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	305,000,000	373,000,000	369,550,000	0	369,550,000	99.08	3,450,000
	JUMLAH BELANJA	13,490,340,000	14,073,397,000	13,678,925,611	1,147	13,678,924,464	97.2	394,472,536

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 477419
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
BA(032) ES1(07) BALI
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 15/01/24 4:32 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43,500,000	8,450,000	8,449,632	0	8,449,632	100	368
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	43,500,000	8,450,000	8,449,632	0	8,449,632	100	368
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	63,300,000	6,775,000	1,275,000	0	1,275,000	18.82	5,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	63,300,000	6,775,000	1,275,000	0	1,275,000	18.82	5,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	106,800,000	15,225,000	9,724,632	0	9,724,632	63.87	5,500,368
	JUMLAH BELANJA	106,800,000	15,225,000	9,724,632	0	9,724,632	63.87	5,500,368

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/01/24 4:34 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,042,026,022	2,596,642,325	445,383,697	17.152
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,042,026,022	2,596,642,325	445,383,697	17.152
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,042,026,022	2,596,642,325	445,383,697	17.152
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,160,300,732	5,720,201,572	440,099,160	7.694
Beban Persediaan	90,232,633	98,408,420	(8,175,787)	(8.308)
Beban Barang dan Jasa	2,602,682,166	3,176,883,011	(574,200,845)	(18.074)
Beban Pemeliharaan	445,798,808	304,787,283	141,011,525	46.266
Beban Perjalanan Dinas	3,812,009,935	3,181,488,009	630,521,926	19.818
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	198,407,547	299,483,930	(101,076,383)	(33.75)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:34 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	610,104,874	540,771,653	69,333,221	12.821
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	13,919,536,695	13,322,023,878	597,512,817	4.485
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,877,510,673)	(10,725,381,553)	(152,129,120)	1.418
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,582,051)	(214,399,298)	211,817,247	(98.796)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8,555,999	9,777,777	(1,221,778)	(12.495)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,138,050	224,177,075	(213,039,025)	(95.032)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,767,916,363	0	1,767,916,363	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,767,916,363	18,747,700	1,749,168,663	9,330.044
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	18,747,700	(18,747,700)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,765,334,312	(214,399,298)	1,979,733,610	(923.386)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,112,176,361)	(10,939,780,851)	1,827,604,490	(16.706)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,112,176,361)	(10,939,780,851)	1,827,604,490	(16.706)

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

GIANYAR, 15 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



GETREDA MELSINA HEHANUSSA

197503032002122003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 15/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 15/01/24 4:35 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17,155,406,917	17,008,668,040	146,738,877	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,112,176,361)	(10,939,780,851)	1,827,604,490	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10,626,636,080	11,086,518,225	(459,882,145)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,514,459,719	146,737,374	1,367,722,345	-
EKUITAS AKHIR	18,669,866,636	17,155,405,414	1,514,461,222	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

GIANYAR, 15 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



GETREDA MELSINA HEHANUSSA

197503032002122003



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 477419
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	14,073,397,000	14,073,397,000	0
2	Belanja	13,678,925,611	13,678,925,611	0
3	Pengembalian Belanja	-1,147	-1,147	0
4	Estimasi Pendapatan	850,000,000	850,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,052,288,384	3,052,288,384	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JAN-24



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202312477419001
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
 TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	886,227	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		886,227

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Kantor Denpasar satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



31 Desember 2023
 Disetujui oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar

Pessy Dwi Lestina Hehanussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202312477419002
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	4,125,637	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		4,125,637

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Hallo satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh :
Kepala BPSPL Denpasar

Osaka Mestika Hehandesa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202312477419003
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
 TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	1,687,257	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,687,257

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Wilker Jawa Timur, Banyuwangi dan NTB dan NTT satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Ditandatangani oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar

Gelembina Hehanussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202312477419004
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
 TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	9,865,650	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		9,865,650

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Listrik BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202312477419005
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	377,880	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		377,880

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Air BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh

Kepala BPSPL Denpasar
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

Getreda Melsina Hetahusa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202312477419006
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
 TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☒ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	205,743	
2	K	512411	Beban Pegawai		205,743

URAIAN PENYESUAIAN

Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh

Kepala BPSPL Denpasar

Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202312477419007
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☒ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	9,500	
2	K	512414	Beban Pegawai		9,500

URAIAN PENYESUAIAN

Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja) PPPK BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh :
Kepala BPSPL Denpasar

Getreda Meisina Hidayat, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202312477419008
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2023 / SEMESTER II TA 2023
 TAHUN ANGGARAN : 2023

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☒ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	740,000	
2	K	511129	Beban Uang Makan PNS		740,000

URAIAN PENYESUAIAN

Kelebihan Pembayaran Uang Makan PNS BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

Desember 2023
 Disetujui oleh :

Kepala BPSPL Denpasar

Getreda Melsina Heranussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 477419

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALI
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/01/24 4:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,555,999	0	8,555,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,992,108	0	4,992,108	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	13,548,107	0	13,548,107	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	729,000,000	1,558,305,000	0	1,558,305,000	213.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	729,000,000	1,558,305,000	0	1,558,305,000	213.76
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	121,000,000	1,478,728,914	0	1,478,728,914	1222.09
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	121,000,000	1,478,728,914	0	1,478,728,914	1,222.09
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,503	0	1,503	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,704,860	0	1,704,860	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,706,363	0	1,706,363	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	850,000,000	3,052,288,384	0	3,052,288,384	359.09
	JUMLAH PENDAPATAN	850,000,000	3,052,288,384	0	3,052,288,384	359.09